

INTISARI

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan keterkaitan proses bisnis DJP, DJBC dan DJA dalam implementasi program *joint analysis* atas pengelolaan batu bara dan mengetahui tantangan yang dihadapi serta langkah mengatasi tantangan dalam pelaksanaan *joint analysis* atas pengelolaan batu bara oleh DJP, DJBC dan DJA. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif studi kasus dengan fokus pada pelaksanaan *joint analysis* di DJP, DJBC dan DJA. Data dikumpulkan dengan teknik wawancara melalui FGD dan dokumentasi. Tujuan program sinergi ini salah satunya adalah adanya irisan kepentingan agar antarinstansi dapat saling mendukung demi tercapainya penerimaan negara yang optimal dan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, Pengguna Jasa Kepabeanan dan Cukai, maupun Wajib Bayar. Terdapat keterkaitan proses bisnis antara DJP, DJBC dan DJA dalam pelaksanaan *joint analysis*. Salah satunya dapat dilihat dari kolaborasi data yang dilakukan untuk mendukung proses pendetailan data melalui VIT. Tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan *joint analysis* meliputi permasalahan data, SDM, *grouping* gugus tugas, dan jangka waktu tanggapan dari wajib bayar. Langkah-langkah yang telah dilakukan selama ini untuk mengatasi tantangan tersebut adalah diskusi bersama antarinstansi, melakukan penyandingan data secara manual, mengoptimalkan personil yang telah ada sekaligus meningkatkan kompetensinya, koordinasi ulang dengan kantor di luar *grouping* gugus tugas dan bekerja sama dengan kementerian lain, misalnya Kementerian ESDM.

ABSTRACT

This study aims to describe the interrelationships of DGT, DGCE and DGB business processes in the implementation of the joint analysis program on coal management and identify the challenges faced and steps to overcome challenges in implementing joint analysis on coal management by DGT, DGCE and DGB. This research was conducted using a case study qualitative approach with a focus on the implementation of joint analysis at DGT, DGCE and DGB. Data was collected by interview technique through FGD and documentation. One of the objectives of this synergy program is the existence of a cross-section of interests so that between agencies can support each other in order to achieve optimal state revenue and increase the compliance of taxpayers, users of customs and excise services and payers. There is a business process linkage between DGT, DGCE and DGB in the implementation of joint analysis. One of them can be seen from the data collaboration carried out to support the data detailing process through VIT. The challenges faced in implementing the joint analysis include issues regarding data, human resources, task force grouping, and the response period from the payer. Steps that have been taken so far to address these challenges include: joint discussions between agencies, manual data pairing, optimizing existing personnel while increasing their competence, re-coordinating with offices outside the task force grouping and working with other Ministries, for example Ministry of Energy and Mineral Resources.

Keywords: synergy, joint analysis, tax, customs and excise, non-tax revenue, coal